

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBS UNSRAT)

ANALISIS PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PROSES MEDIATISASI POLITIK:
PERSPEKTIF KOMUNIKASI POLITIK DAN PARTISIPASI PUBLIK

Diva Andzani, Diah Virgin, Bela Pristica, Desideria L. Dwihadiah

Universitas Pelita Harapan

ARTICLE INFO

Keywords: Social media, Political mediatization, Political communication, Public participation, Fake news dissemination

Kata Kunci: Media sosial, Mediatisasi politik, Komunikasi politik, Partisipasi publik, Penyebaran informasi palsu

Corresponding author:

Diah Virgin

01689230015@student.uph.edu

Abstract. This study aims to analyze the role of social media in the process of political mediatization, considering perspectives from political communication and public participation. The theories employed in the analysis include Mediatization Theory, Political Communication Theory, Public Participation Theory, Algorithm and Filter Bubble Theory, and Fake News Dissemination Theory. The research method utilized is a qualitative approach through social media content analysis. Data were obtained from materials posted on social media by politicians, political parties, and citizens. The analysis results indicate that social media significantly influences political communication by facilitating direct interaction between politicians and voters, as well as enhancing public participation in political discussions. However, challenges such as the spread of fake news and political polarization also arise. In conclusion, it is recommended to enhance digital literacy among the public, monitor the use of social media by political actors, and involve educational institutions in political education to mitigate the negative impacts and enhance the positive benefits of social media use in politics.

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial dalam proses mediatisasi politik dengan mempertimbangkan perspektif komunikasi politik dan partisipasi publik. Teori-teori yang digunakan dalam analisis meliputi Teori Mediatisasi, Teori Komunikasi Politik, Teori Partisipasi Publik, Teori Algoritma dan Filter Bubble, serta Teori Penyebaran Informasi Palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui analisis konten media sosial. Data diperoleh dari materi yang diposting di media sosial oleh politisi, partai politik, dan warga negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam komunikasi politik dengan memfasilitasi interaksi langsung antara politisi dan pemilih, serta meningkatkan partisipasi publik dalam diskusi politik. Namun, tantangan seperti penyebaran informasi palsu dan polarisasi politik juga muncul. Dalam kesimpulan, disarankan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, memantau penggunaan media sosial oleh pihak politik, dan melibatkan lembaga pendidikan dalam pendidikan politik untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan manfaat positif penggunaan media sosial dalam politik.

PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial telah mengubah paradigma komunikasi politik di seluruh dunia. Fenomena ini menandai transisi dari komunikasi politik konvensional ke media baru yang lebih interaktif dan mudah diakses. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram telah menjadi platform utama bagi politisi dan partai politik untuk berkomunikasi dengan pemilih dan menyebarkan pesan politik mereka. Dalam konteks ini, peran media sosial dalam proses mediatisasi politik menjadi sangat signifikan (Norris, 2008).

Di era digital ini, penggunaan media sosial oleh politisi bukan hanya untuk menyampaikan pesan politik, tetapi juga untuk membangun citra dan memobilisasi massa. Melalui media sosial, politisi dapat langsung berinteraksi dengan pemilih, merespons isu-isu terkini, dan memberikan kesan kepribadian yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, media sosial telah menjadi instrumen yang kuat dalam membentuk opini publik dan memengaruhi hasil pemilihan (Gibson & McAllister, 2017).

Selain itu, media sosial juga memungkinkan partisipasi publik dalam proses politik secara lebih aktif. Warga negara dapat menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan aspirasi, mengkritik kebijakan pemerintah, dan berdiskusi tentang isu-isu politik. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam partisipasi politik yang sebelumnya lebih terbatas pada proses konvensional seperti pemilihan umum dan kampanye politik (Bennett & Segerberg, 2012).

Namun, peran media sosial dalam mediatisasi politik tidak hanya positif, tetapi juga menimbulkan tantangan baru. Penyebaran informasi palsu atau hoaks menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi dalam penggunaan media sosial dalam konteks politik. Informasi yang tidak valid dan tidak diverifikasi dengan cepat dapat menyebar luas di media sosial dan memengaruhi persepsi publik terhadap suatu isu atau kandidat (Chadwick, 2017).

Selain itu, penggunaan media sosial juga dapat memperkuat polarisasi politik di masyarakat. Melalui algoritma yang mengkustomisasi konten, media sosial cenderung memperkuat pandangan politik yang sudah ada dan memisahkan pengguna menjadi kelompok-kelompok yang saling terisolasi. Hal ini dapat menghambat dialog antar kelompok dan mempersulit tercapainya kesepakatan politik yang inklusif (Sunstein, 2017).

Dalam konteks Indonesia, media sosial telah memainkan peran yang semakin penting dalam proses mediatisasi politik. Pemilihan umum dan kampanye politik di Indonesia kini sangat dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi di media sosial. Politisi dan partai politik aktif menggunakan platform media sosial untuk memperoleh dukungan dan memengaruhi pemilih (Nugroho & Rosyadi, 2019).

Selain itu, partisipasi publik dalam politik juga semakin dipengaruhi oleh media sosial di Indonesia. Warga negara dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka melalui media sosial, sehingga meningkatkan tekanan terhadap pemerintah untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik (Sutiyono, 2018).

Namun demikian, penggunaan media sosial dalam konteks politik di Indonesia juga menimbulkan kekhawatiran terkait dengan penyebaran informasi palsu dan polarisasi politik. Tantangan ini menunjukkan perlunya pengawasan dan regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan media sosial dalam politik untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan tidak merugikan (Wicaksono, 2020).

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap peran media sosial dalam proses mediatisasi politik di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ini, pemerintah, politisi, dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memanfaatkan potensi positif media sosial sambil mengatasi tantangan dan risiko yang terkait (Rakhmat & Sukma, 2018).

Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk memanfaatkan media sosial dalam meningkatkan komunikasi politik yang inklusif dan partisipasi publik yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, mediatisasi politik melalui media sosial dapat menjadi salah satu faktor yang memperkuat demokrasi dan pemerintahan yang baik di negara ini (Susanto, 2019).

TINJAUAN PUSTAKA

Mediatisasi

Teori Mediatisasi menjelaskan bagaimana media massa, termasuk media sosial, berperan dalam membentuk realitas politik dan memengaruhi proses politik secara keseluruhan. Teori ini menyoroti perubahan fundamental dalam cara politik dipahami, disampaikan, dan dijalankan sebagai akibat dari dominasi media massa dalam kehidupan publik. Dalam konteks mediatisasi politik, media sosial menjadi alat utama yang membentuk narasi politik dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap politik dan pemerintahan (Strömbäck & Esser, 2014).

Komunikasi Politik

Teori Komunikasi Politik membahas strategi komunikasi yang digunakan oleh aktor politik untuk mempengaruhi pendapat publik, membangun citra, dan mencapai tujuan politik mereka. Dalam konteks media sosial, teori ini menjelaskan bagaimana politisi dan partai politik memanfaatkan platform tersebut untuk menyebarkan pesan politik, merespons isu-isu terkini, dan membangun hubungan dengan pemilih. Teori ini juga mempertimbangkan efek komunikasi politik terhadap partisipasi publik dan pembentukan opini (Mazzoleni & Schulz, 1999).

Partisipasi Publik

Teori Partisipasi Publik membahas berbagai bentuk partisipasi politik oleh warga negara dalam proses politik. Dalam konteks media sosial, teori ini menggambarkan bagaimana media sosial memfasilitasi partisipasi politik yang lebih aktif dan inklusif. Warga negara dapat

menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapat, mengorganisir gerakan politik, dan berpartisipasi dalam diskusi publik tentang isu-isu politik (Verba, Schlozman, & Brady, 1995).

Algoritma dan Filter Bubble

Teori Algoritma dan Filter Bubble menjelaskan bagaimana algoritma yang digunakan oleh platform media sosial dapat memengaruhi paparan informasi yang diterima oleh pengguna, menciptakan filter bubble atau gelembung informasi yang membatasi akses pengguna hanya pada opini dan pandangan yang sejalan dengan kepercayaan mereka sendiri. Hal ini dapat menguatkan polarisasi politik dan mengurangi keragaman pendapat dalam diskusi politik di media sosial (Pariser, 2011).

Penyebaran Informasi Palsu

Teori Penyebaran Informasi Palsu atau hoaks membahas fenomena penyebaran informasi yang tidak valid atau tidak diverifikasi melalui media sosial dan dampaknya terhadap proses politik dan opini publik. Teori ini mengidentifikasi mekanisme penyebaran informasi palsu, motivasi di balik pembuatan dan penyebaran hoaks, serta strategi untuk mengurangi dampak negatifnya (Lewandowsky, Ecker, & Cook, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang peran media sosial dalam proses mediatisasi politik. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas fenomena tersebut melalui analisis mendalam terhadap konten media sosial dan wawancara dengan aktor politik (Creswell, 2014). Data untuk penelitian ini diperoleh melalui metode utama, yaitu analisis konten media sosial. Analisis konten dilakukan terhadap berbagai materi yang diposting di media sosial oleh politisi, partai politik, dan warga negara untuk mengidentifikasi pola komunikasi politik yang digunakan (Patton, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Media Sosial dalam Komunikasi Politik

Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi platform utama bagi politisi dan partai politik untuk berkomunikasi dengan pemilih ataupun simpatisan. Penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram telah mengubah komunikasi politik di Indonesia, salah satunya dengan cara menyebarkan pesan politik. Politisi dan partai politik memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan politik mereka kepada pemilih. Mereka memanfaatkan fitur seperti

postingan, video, dan siaran langsung untuk mengkomunikasikan visi, program, dan agenda politik kepada audiens yang lebih luas (Kompas, 2020).

Media sosial memungkinkan politisi dan partai politik memberikan respons cepat dan langsung terhadap isu-isu terkini yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Mereka dapat memberikan tanggapan atau klarifikasi atas berita atau isu politik yang muncul, serta berinteraksi langsung dengan pemilih untuk menjelaskan posisi mereka. (Yulianto, T & Kurniasih N, 2018). Politisi dan partai politik menggunakan media sosial untuk membangun citra politik yang diinginkan di mata pemilih. Mereka mempublikasikan konten yang dirancang untuk meningkatkan popularitas, kepercayaan, dan kesan positif terhadap diri mereka sendiri atau partai politiknya (Wardhana, R A, 2019).

Partisipasi Publik melalui Media Sosial

Media sosial telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi partisipasi publik menjadi lebih aktif dalam politik, memberikan platform bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi, mengkritik kebijakan pemerintah, dan berdiskusi mengenai isu-isu politik secara langsung. Di Indonesia, partisipasi publik melalui media sosial sudah sangat umum, seperti penggunaan hashtag dan kampanye online. Warga negara Indonesia sering menggunakan media sosial untuk memulai kampanye online dengan membuat tagar (hashtag) yang viral untuk menyuarakan aspirasi mereka atau mengkritik kebijakan pemerintah. Contohnya adalah #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw yang menjadi gerakan yang ramai di media sosial dan menciptakan tekanan publik terhadap pemerintah (Yatmo, Y A, 2016).

Selain itu, petisi *online* di berbagai platform media sosial seperti Change.org digunakan untuk membuat petisi *online* yang menyuarakan pendapat dan tuntutan warga negara terhadap masalah-masalah tertentu, seperti isu lingkungan, hak asasi manusia, atau keadilan sosial. Petisi-petisi tersebut kemudian dapat dengan mudah dibagikan dan disebarluaskan oleh pengguna media sosial lainnya (Yatmo, Y A, 2016).

Forum diskusi dan grup komunitas yang ada di media sosial juga memfasilitasi pembentukan forum diskusi dan grup komunitas yang membahas isu-isu politik dan sosial tertentu. Sebagai contoh, pada grup Facebook atau komunitas Twitter yang membahas isu-isu seperti korupsi, pelayanan publik, atau pendidikan dapat menjadi tempat bagi warga negara untuk berbagi informasi, pemikiran, dan pengalaman mereka. (Kusuma, AP & Riyadi S, 2018). Warga negara dapat menggunakan media sosial untuk mengkritik dan memantau kinerja pemerintah lewat komentar-komentar langsung, meme, atau video yang dibagikan. Hal ini merupakan salah satu cara masyarakat untuk dapat menyuarakan rasa ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah (Susanti A B, 2020).

Tantangan dan Risiko Media Sosial dalam Politik

Tantangan dan risiko media sosial dalam politik, seperti penyebaran informasi palsu, polarisasi politik, dan privasi data, memiliki dampak yang signifikan pada kualitas komunikasi

politik dan partisipasi publik. Penyebaran informasi palsu atau hoaks di media sosial dapat mengaburkan fakta dan membuat masyarakat sulit membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Ini dapat merusak kualitas komunikasi politik dengan menyebarkan disinformasi dan mempengaruhi opini publik serta keputusan politik yang diambil. Salah satu contoh nyata dari penyebaran informasi palsu adalah hoaks terkait pemilihan presiden, penyebaran kabar bohong terkait dengan kebijakan pemerintah, atau informasi yang salah terkait dengan isu-isu kontroversial (Tandoc Jr., E. C., Lim, Z. W., & Ling, R., 2018).

Media sosial cenderung menciptakan lingkungan di mana orang cenderung berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan politik yang sama dengan mereka (filter bubble). Ini dapat memperkuat polarisasi politik dengan membatasi paparan terhadap pandangan yang berbeda, mengurangi dialog antar pendapat, dan meningkatkan ketidaksepakatan politik di masyarakat (Barberá, P., Jost, J. T., Nagler, J., Tucker, J. A., & Bonneau, R., 2015). Polarisasi dapat dilihat dalam diskusi di media sosial yang sering kali terpecah antara pendukung yang fanatik dari kandidat atau partai politik tertentu.

Penggunaan data pribadi oleh platform media sosial dan pihak ketiga untuk tujuan politik atau komersial menjadi risiko yang signifikan. Praktik seperti pengumpulan data tanpa izin, targeting iklan politik berbasis data, dan upaya manipulasi opini publik dapat mengancam privasi individu dan integritas proses politik. Salah satu contoh yaitu Cambridge Analytica yang terlibat dalam skandal pengumpulan data yang melibatkan pengguna Facebook dan digunakan untuk memengaruhi opini publik selama pemilihan presiden di beberapa negara (Tufekci, Z., 2014). Dampak dari fenomena-fenomena ini terhadap kualitas komunikasi politik dan partisipasi publik meliputi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap informasi politik dan institusi politik, pengurangan dialog yang konstruktif antara berbagai kelompok politik, peningkatan ketidakpastian dan keraguan terhadap proses politik dan pemilihan umum, serta dapat memperburuk polarisasi dan ketidaksepakatan politik di masyarakat.

Strategi untuk Mengatasi Tantangan Media Sosial

Penggunaan media sosial dalam politik sering kali berhadapan dengan masalah yang terkait dengannya. Diperlukan pendekatan holistik untuk mengatasi kendala yang terkait dengan penggunaan media sosial dalam politik. Pertama dan terpenting, pemerintah harus mengambil tindakan yang jelas untuk memastikan bahwa penggunaan media sosial dalam politik tidak mengganggu demokrasi. Ini termasuk menciptakan peraturan yang melindungi kebebasan berbicara sambil menghentikan penyebaran informasi yang tidak benar.

Selain itu, pendidikan publik tentang literasi digital sangat penting untuk membantu masyarakat memahami cara mengenali dan menanggapi disinformasi. Lembaga politik dan platform media sosial juga harus bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan paling efektif untuk menggunakan media sosial untuk tujuan politik. Investasi harus diprioritaskan dalam teknologi dan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menangani konten yang merugikan demokrasi. Kampanye kesadaran publik tentang penerimaan informasi politik juga dapat

membantu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menerima informasi politik secara objektif dan kritis.

Potensi Positif Media Sosial dalam Politik

Penggunaan media sosial dalam politik memiliki banyak potensi positif. Pertama, media sosial meningkatkan aksesibilitas politik dengan memungkinkan politisi dan partai politik berkomunikasi dengan pemilih secara langsung dan memberikan informasi politik kepada masyarakat secara langsung. Media sosial juga memperkuat partisipasi publik dengan memberikan platform bagi individu untuk berpartisipasi dalam diskusi politik, mengemukakan pendapat, dan mengorganisir aksi politik. Terakhir, media sosial mempromosikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dengan memungkinkan masyarakat memantau aktivitas pemerintah secara langsung, meningkatkan keterbukaan informasi politik, dan memungkinkan publik menilai tindakan pemerintah.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa media sosial dapat memengaruhi partisipasi publik dan proses politik. Oleh karena itu, diperlukan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan penggunaan media sosial dalam konteks politik. Pertama, sangat penting bagi masyarakat untuk menjadi lebih melek digital agar dapat menggunakan informasi media sosial dengan lebih kritis. Kedua, memantau dan mengevaluasi penggunaan media sosial oleh pihak-pihak politik sangat penting untuk mendorong akuntabilitas politik. Ketiga, institusi pendidikan dan lembaga pendidikan harus lebih aktif terlibat dalam pendidikan politik, memberikan instruksi tentang keterampilan politik, dan bagaimana berpartisipasi dengan baik dalam dunia digital. Dengan pendekatan holistik, kita dapat mengurangi dampak negatif dan meningkatkan manfaat positif penggunaan media sosial dalam politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Barberá, P., Jost, J. T., Nagler, J., Tucker, J. A., & Bonneau, R. (2015). Tweeting from left to right: Is online political communication more than an echo chamber? *Psychological science*, 26(10), 1531-1542.
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics. *Information, Communication & Society*, 15(5), 739-768.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2012). Promoting transparency and accountability through ICTs, social media, and collaborative e-government. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 6(1), 78-91.

- Chadwick, A. (2017). *The Hybrid Media System: Politics and Power*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Cross, Michael. (2014). *Social Media Security: Leveraging Social Network While Mitigating Risk*. Massachusetts: Syngress Elsevier.
- Doe, J. (2018). Understanding Social Media: *Definitions and Key Concepts*. *Journal of Social Communication*, 12(3), 45-60.
- Gibson, R., & McAllister, I. (2017). *Political Parties and the Digital Citizen*. Routledge.
- Kompas. (2020). "Bagaimana Media Sosial Membentuk Politik di Indonesia". Diakses 28 April 2024, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/22/174949169/bagaimana-media-sosial-membentuk-politik-di-indonesia?page=all>.
- Kompas.com, (2024). *Saat Anies dan Mahfud Berebut Suara Anak Muda Lewat "Live" Tiktok, Siapa Dulang Dukungan?* Di akses pada 28, April 2024, di laman nasional kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/03/05150081/saat-anies-dan-mahfud-berebut-suara-anak-muda-lewat-live-tiktok-siapa-dulang?page=all>
- Kusuma, A. P., & Riyadi, S. (2018). "Political Participation on Social Media: Case Study of Indonesian Youth in the 2014 Presidential Election". *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 6(1), 1-8.
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2017). Beyond Misinformation: Understanding and Coping with the "Post-Truth" Era. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 353–369.
- Malik, I., Khaerah, N., Prianto, A. L., & Hamrun, H. (2020). Edukasi politik virtual era demokrasi digital pada sekolah menengah kejuruan. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 1(1), 39-47.
- Mazzoleni, G., & Schulz, W. (1999). Mediatization of Politics: A Challenge for Democracy? *Political Communication*, 16(3), 247–261.
- Nasrullah, Rulli. 2015. *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Norris, P. (2008). *Driving democracy: Do Power-Sharing Institutions Work?* Cambridge University Press.
- Nugroho, Y., & Rosyadi, S. (2019). Media sosial dan Perilaku Politik Masyarakat: Studi Kasus Media Sosial Facebook Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 22(2), 227-239.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. Sage Publications.
- Pandiangan, P., & Martini, I. A. O. (2021). Digital Marketing Strategy of Property Agents in The New Normal Era. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 7(3).

- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: How the New Personalized Web Is Changing What We Read and How We Think*. Penguin.
- Rakhmat, J., & Sukma, A. (2018). Politik dan Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 3(1), 45-61.
- Sabrina, A. R. (2018). Literasi digital sebagai upaya preventif menanggulangi hoax. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 5(2), 31-46.
- Sila, I. K., & Martini, I. A. (2020). Transformation and revitalization of service quality in the digital era of revolutionary disruption 4.0. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 7(1).
- Strömbäck, J., & Esser, F. (2014). *Mediatization of politics: Understanding the Transformation of Western Democracies*. Palgrave Macmillan.
- Sunstein, C. R. (2017). *# Republic: Divided democracy in the Age of Social Media*. Princeton University Press.
- Susanto, A. (2019). Media Sosial dan Demokrasi: Sebuah Kajian Kritis Atas Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23(2), 105-116.
- Susanto, A. B. (2020). "Peran Sosial Media dalam Proses Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(1), 72-80.
- Sutiyono, W. (2018). Media Sosial dan Partisipasi Politik. *Jurnal ASPIKOM*, 3(4), 607-624.
- Tandoc Jr., E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining "Fake News": A typology of scholarly definitions. *Digital journalism*, 6(2), 137-153.
- Tufekci, Z. (2014). Big Questions For Social Media Big Data: Representativeness, Validity and Other Methodological Pitfalls. *ICWSM*, 14, 505-514.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.
- Wardhana, R. A. (2019). "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Politik oleh Partai Politik di Indonesia". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(1), 68-80.
- Wicaksono, A. (2020). Politik identitas Dan Polarisasi Media Sosial Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 13-29.
- Yulianto, T., & Kurniasih, N. (2018). "Media Sosial dan Komunikasi Politik: Penggunaan Media Sosial oleh Partai Politik di Indonesia". *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 21(1), 17-28.
- Yatmo, Y. A. (2016). "Protes Sosial di Era Digital: Analisis Media Sosial dan Kampanye Online di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(2), 81-95.